

## TAJUK RENCANA

### Pendaftaran Haji Online

**INOVASI** tiada henti. Tampaknya semboyan inilah yang terus dilaksanakan Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Tujuannya pasti untuk memberi pelayanan maksimal dan tentu saja perlindungan kepada jemaah. Sebagaimana diketahui, dalam penyelenggaraan haji 2020 (meski pemberangkatan dibatalkan karena pandemi Covid-19), Kemenag melakukan 13 inovasi. Sebelumnya sudah melaksanakan inovasi "5 pasti" untuk melindungi jemaah umrah. Sekarang ini tengah mempersiapkan layanan mobile dan online untuk pendaftaran haji.

Regulasi untuk mendasari layanan ini sebenarnya sudah dipersiapkan cukup lama. Sebagaimana diberitakan koran ini kemarin (Kamis 2/7), Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag RI, Muhajirin Yanis, menjelaskan, Rancangan Peraturan Menteri Agama atau RPMA terkait ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Regulasi ini antara lain menjelaskan makna dikum pendaftaran haji di kantor Kemenag yang ada dalam UU No 13 tahun 2008.

Regulasi tersebut mengatur bahwa kantor tidak sebatas diartikan secara fisik yang mengharuskan orang datang, tapi juga bisa dimaknai lebih luas termasuk sebagai layanan virtual. Karena itu, jika regulasi tersebut sudah terbit, maka pendaftaran haji bisa dilakukan lebih fleksibel. Calon jemaah haji bisa memanfaatkan layanan mobile yang akan ditempatkan di sejumlah titik, tidak harus ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan secara online, sehingga pendaftaran bisa dari mana saja. Misal calon jemaah sedang berada di luar kota atau bahkan luar negeri, tapi KTP-nya Gorontalo, maka dia bisa mendaftar haji dari kota atau negara tersebut untuk kuota Gorontalo melalui layanan online. Semua sudah berbasis digital.

Intinya, umat Islam yang berminat dan siap mendaftar haji bisa melakukan pendaftaran di mana saja. Tidak harus datang secara fisik ke Kantor Kemenag dan bank penerima setoran BPIH setempat, sesuai alamat KTP-nya. Layanan ini sangat memudahkan bagi mereka yang sedang merantau, apakah karena bekerja atau sedang belajar di daerah lain. Mereka tidak perlu mudik dulu. Sebab, dari tempatnya merantau itu ia bisa mendaftar ha-

ji untuk kuota kabupaten/kota sesuai KTP-nya. Ini salah satu sisi positif manfaat inovasi yang dilakukan Kemenag RI.

Namun di sisi lain, meski tidak dikatakan sebagai sisi negatif, pasti antrean daftar tunggu (*waiting list*) akan semakin panjang lagi. Di DIY, misalnya, lama antrean daftar tunggu sekarang sudah sekitar 25 tahun. Sedangkan provinsi lain ada yang sudah mencapai 30 tahun. Kalau layanan pendaftaran haji online dilaksanakan, maka daftar tunggu akan semakin cepat panjang. Apalagi sekarang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong generasi muda untuk segera mendaftar haji (haji muda). Para pimpinan BPKH sudah 'kampanye haji muda' ke berbagai daerah dan menyarankan bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada di daerah.

Artinya, semakin panjangnya daftar tunggu juga mesti disikapi oleh Kemenag RI. Misalnya dengan melobi Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota, meski selama ini Indonesia sudah menjadi negara pengirim jemaah haji terbanyak. Selain itu juga perlu mendorong Arab Saudi melakukan inovasi kapasitas jemaah haji dengan tetap memegang teguh prinsip syariah atau fikih haji, sehingga ibadah yang dilakukan seluruh jemaah haji tetap sah, tentu saja juga aman. Antara lain inovasi terkait kapasitas jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang merupakan tempat pokok untuk pelaksanaan haji.

Sebagaimana diketahui, hotel-hotel di Makkah dan Madinah terus tumbuh dan berkembang, sehingga semakin banyak mampu menampung jemaah haji dan umrah. Namun untuk wilayah Armuzna memang terbatas. Untuk Mina pemah dilakukan inovasi dengan peralasan, sehingga ada Mina Jadid dan Mina Jaidul Jadid. Karena tempat memang terbatas, untuk bisa semakin banyak menampung jemaah, sempat muncul wacana adanya tenda bertingkat. Mungkin ini bisa menjadi solusi inovasi. Namun sebelumnya perlu dilakukan pengkajian secara syar' oleh para ulama. Misalnya sudah dipisahkan tenda bertingkat diperbolehkan, baru dilaksanakan. Setelah itu kuota haji bisa ditingkatkan.

Kita berharap, selain calon haji memudahkan dalam proses pendaftaran, juga bisa dipercepat dalam pemberangkatan. Semoga berbagai upaya inovasi yang dilakukan berhasil. Aamiin... □

# Pengejawantahan Falsafah Pancadarma Tamansiswa

**PEMERINTAH** sedang merevitalisasi pendidikan vokasi untuk menghapus kesenjangan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dirombak dengan membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pada tataran program, gerakan 'perjodohan massal' antara pendidikan vokasi dan dunia industri mulai dirintis.

Ki Hadjar Dewantara 98 tahun silam (3 Juli 1922) mendirikan Tamansiswa. Salah satu tugas Tamansiswa ialah *zendings arbeid* dan *redding arbeid* yang masing-masing berarti kerja. Pertama, kerja yang bermaksud untuk mewujudkan suatu tugas, panggilan, cita-cita yang suci yang sering disebut misi. Kedua, kerja yang bermaksud untuk menolong dan menyelamatkan yang bersifat insidental, yang sering disebut sebagai kebijakan. *Zendings* menyatakan cara kerja yang prinsipil, pokok, dan oleh karena itu bersifat terus menerus, konstan, dan hakiki. Sedang *redding* menunjukkan cara kerja yang insidental, tidak pokok, dan oleh karena itu bersifat sementara dan tidak konstan.

#### Tidak Selaras

Kesenjangan dunia pendidikan dengan dunia kerja yang sampai saat ini masih terjadi tidak lepas dari kerja *zendings* dan kerja *redding* yang tidak selaras. Misi dan kebijakan pendidikan nasional sering tidak sejalan. Lembaga pendidikan didorong menghasilkan lulusan siap latih, tetapi kebijakannya menuntut menghasilkan lulusan siap kerja.

Lulusan lembaga pendidikan tidak serta merta langsung bekerja adalah realitas. Selama belajar anak didik memperoleh pengalaman belajar tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan tanpa muatan 'ilmu bekerja'. Pemakaian *zendings arbeid* dan *redding arbeid* dalam pendidikan nasional sebatas konsep yang miskin implementasi.

Gagasan *link and match* Menteri Wardiman Djonegoro (1993-1998) yang

#### Ki Sugeng Subagya

konsep dasarnya adalah upaya peningkatan mutu pendidikan agar kompetensi lulusan pendidikan mampu menjawab tantangan globalisasi, dipersepsikan sebagai *redding arbeid* yang kemudian dipertentangkan dengan *zendings arbeid*. Pertentangan itu berakibat fatal. Periode Menteri selanjutnya (2004-2009) menerjemahkan *link and match* sebatas



KR-JOKO SANTOSO

meningkatkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU). SMK 70% berbanding 30% SMU. Akibatnya, pada tahun 2019 Biro Pusat Statistik mencatat lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar jumlah pengangguran.

#### Dipraktikkan

Keserasian antara *zendings arbeid* dan *redding arbeid* dipraktikkan di kalangan Tamansiswa sebagai pengejawantahan falsafah Pancadarma Tamansiswa. Pendidikan jiwa merdeka sebagai kerja misi diselenggarakan dengan pendidikan keterampilan sebagai kebijakan. Lahirnya Taman Guru (Sekolah Pendidikan Guru), Taman Tani (Sekolah Menengah Pertanian), Taman Karya

Madya Teknik (Sekolah Menengah Kejuruan Teknik), dan Taman Karya Madya Ekonomi (Sekolah Menengah Kejuruan Ekonomi) membuktikan hal itu.

Pancadarma mendasari keselarasan kerja misi dan kebijakan. Ditegaskan Ki Hadjar Dewantara: berilah *kemerdakaan* kepada anak-anak kita. Bukan kemerdekaan yang luasa, melainkan yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan *kodrat alam* yang nyata dan menuju arah *kebudayaan*, yakni keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, perlulah dipakai dasar *kebangsaan*. Akan tetapi, jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar *kemanusiaan*. Gagasan inilah yang kemudian oleh Panitia Mangunsarkoro dirumuskan sebagai Pancadarma Tamansiswa.

Revitalisasi pendidikan vokasi perlu mereaktualisasi Pancadarma Tamansiswa sebagai pengejawantahan falsafah pendidikan nasional menyelenggarakan *zendings arbeid* dan *redding arbeid* dengan berpedoman pada *azas ngeli ananging ora keli*. Mengikuti aliran air tetapi tidak sampai hanyut. Ketika Tamansiswa kini turut terhanyut dalam aliran ketidakserasian *zendings arbeid* dan *redding arbeid*, itulah persoalan internal Tamansiswa yang harus diantisipasi di usianya yang ke-98 tahun. Dirgahayu Tamansiswa, hidup-lah-mu semerdekanya dan bersinarlah semulianya. □

*\*) Ki Sugeng Subagya, Pamong Tamansiswa, praktisi pendidikan dan kebudayaan.*

#### Syarat Menulis Opini

Para penulis ter hormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke [opini@kr.com](mailto:opini@kr.com) dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih

# Menakar Efektivitas Sistem Zonasi

**SETIAP** kalender akademik telah ditetapkan dan penerimaan siswa baru mulai dibuka, berbagai persoalan bisa dipastikan akan bermunculan. Kisruh penerimaan siswa baru tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai daerah. Di berbagai daerah, tidak sedikit orang tua yang menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan sistem zonasi yang dinilai tidak konsisten sehingga merugikan peserta didik.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai kisruhnya pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah bersumber dari kegagalan pemerintah daerah mengelola PPDB berbasis zonasi. Kebijakan PPDB berbasis zonasi yang telah diterapkan sejak tiga tahun lalu, ternyata tidak selalu konsisten diterapkan. Sehingga memicu munculnya kegaduhan orang tua dan siswa yang merasa dirugikan.

#### Menyiasati

Tujuan diberlakukan siswa zonasi dalam penerimaan siswa baru, sebetulnya baik. Pemberlakuan sistem zonasi PPDB bukan saja diharapkan akan dapat mengurangi kemacetan dan mengikis disparitas antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Tetapi, juga akan mendorong pengembangan pemerataan akses kualitas pendidikan yang sama terhadap siswa yang pandai maupun siswa kurang pandai.

Selama ini, diakui atau tidak kualitas sekolah satu dengan yang lain masih sangat berbeda. Dengan penerapan sistem zonasi PPDB sebetulnya diharapkan akan membuat kualitas sekolah satu dengan yang lain relatif sama. Namun fakta di lapangan tidaklah mudah membalik telapak tangan.

Praktik yang terjadi di lapangan ternyata tidak sedikit orang tua yang berusaha menyalurkan anaknya ke sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Untuk

#### Bagong Suyanto

menyiasati agar anaknya bisa diterima di sekolah favorit, tidak sekali-dua kali terjadi ada orang tua yang memindahkan anaknya ikut ke KK (Kartu Keluarga) kerabatnya yang satu zona dengan sekolah yang diinginkan. Bahkan, untuk memuluskan keinginan orang tua agar anaknya dapat diterima di sekolah favorit, ditengarai ada pula orang tua yang tidak segan membayar uang pelicin ke berbagai oknum.

#### Akar Masalah

Akar masalah dari munculnya kekisruhan penerimaan siswa baru yang terjadi di berbagai daerah sesungguhnya adalah bermula dari keterbatasan kapasitas sekolah di setiap kenaikan jenjang. Kapasitas penerimaan sekolah dari jenjang terbawah ke level berikutnya berbentuk piramida, sehingga mau tidak mau harus dilakukan seleksi. Di DIY, misalnya, dari 38 ribu lebih calon peserta didik (calon siswa/casis) dari jenjang SMP, mereka harus memperebutkan 32.000 kursi di jenjang SMA dan SMK Negeri.

Sementara itu, di DKI Jakarta, jumlah SMP Negeri yang ada dilaporkan hanya bisa menampung 46,21% lulusan SD. Sedangkan jumlah total kursi SMA umum dan kejuruan hanya bisa menampung 32,93% lulusan SMP. Untuk mencegah agar kekisruhan tidak terus terulang terjadi, kuncinya bukan hanya pada konsistensi penerapan sistem PPDB. Tetapi juga pada keseriusan pe-

merintah untuk membangun kualitas sekolah yang benar-benar merata.

Berharap siswa dan orang tua mau mendaftar di sekolah yang ada di zona tempat tinggal mereka, tentu tidak mudah jika faktanya kualitas sekolah yang ada dinilai masih jauh ketinggalan. Jangan sampai terjadi, di antara sekolah negeri kualitas sekolah satu dengan yang lain masih terpolarisasi. Sehingga orang tua yang mampu secara ekonomi akhirnya lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang berkualitas. Meski mahal.

Tanpa basis kualitas sekolah negeri yang sama, niscaya penerapan siswa PPDB akan gagal dan tetap memicu munculnya kekisruhan. Kegagalan penerapan sistem PPDB bukan tidak mungkin akan membuat pamor sekolah swasta makin *moncer*. Sementara nasib sekolah negeri justru akan terpuruk karena ditinggal peminatnya. □

*\*) Prof Dr Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Anak FISIP Universitas Airlangga.*

## Pojok KR

Aktivitas vulkanik Merapi, meningkat.  
-- Terus tingkatkan kewaspadaan.  
\*\*\*  
Pastikan ponpes tak jadi klaster baru Covid-19.  
-- Perlu upaya konkret bersama-sama.  
\*\*\*  
Pemkot wajibkan hewan kurban 'diguyang'.  
-- Calon 'tungganngan' di surga harus bersih.

*Berabe*

### Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

## KKN Online Normal Baru

**TERHITUNG** sejak Maret, ketika kasus pertama positif Covid-19 diumumkan di Indonesia, berbagai bentuk kegiatan sosial mulai diadakan. Berbagai bentuk kebijakan penanganan untuk memutus rantai penyebaran virus ramai diberlakukan. Bentuknya pun beragam, mulai dari *social distancing*, mencuci tangan dengan sabun, hingga PS-BB di sejumlah daerah.

Memasuki masa kenormalan baru, beberapa kegiatan mulai dibuka kembali dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai WHO. Namun dampak pandemi masih terasa di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pendidikan. Pada ranah pendidikan tinggi misalnya, perkuliahan masih diberlakukan secara daring yang dapat diakses melalui gadget maupun komputer.

Hal itu juga berimbas pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yang juga dilakukan secara daring, merujuk pada Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 bidang Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KKN Online pun menuai pro dan kontra, meskipun memasuki era kenormalan baru bahaya akan risiko tertular Covid-19 tetaplah tinggi. Namun rasa ketidakpuasan mahasiswa dengan program KKN virtual pun banyak dirasakan. Mengingat KKN hanya dilakukan sekali selama masa kuliah, dan menjadi ajang mahasiswa untuk mengabdikan diri terjun langsung di tengah masyarakat.

Selain itu, kuliah online yang selama ini dilakukan pun terbilang banyak hambatan. Misalnya akses signal yang sulit untuk mengakses pembelajaran di sejumlah tempat, hingga kuota internet yang setiap harinya harus dikuras untuk mengikuti pembelajaran via daring. Melihat hal demikian, tentu dapat menjadi bahan evaluasi bersama ketika hendak melaksanakan KKN Online tersebut.

Merespon hal ini, konsep pelaksanaan KKN Online membuat mahasiswa dituntut untuk melakukan banyak persiapan, baik secara psikis maupun fisik. Kreativitas dan inovasi mahasiswa diuji guna mempersiapkan model KKN ini. Bagaimana pun, pengabdian kepada masyarakat haruslah tetap dilakukan, mengingat hal ini merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah menjadi pedoman.

Selama ini, program KKN dilakukan dengan mengedepankan aspek pembangunan secara menyeluruh di tengah masyarakat. Di tengah pandemi seperti sekarang, inovasi program KKN dilakukan agar mahasiswa terlibat aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Adapula sektor lain juga sangat berpotensi bila dikembangkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Dalam hal ini, untuk mendukung KKN Online perlunya sinergi antara pemerintah, PTKI, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Pengendalian dan pengawasan pun perlu dilakukan secara berkala oleh pembimbing. Meskipun online, diharapkan KKN tetap menjadi ajang mahasiswa untuk menyalurkan kontribusi kepada masyarakat. Hal ini tentunya dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa.

Meskipun banyak kendala yang dihadapi, tapi KKN Online tetaplah menjadi salah satu alternatif untuk turut andil dalam kehidupan masyarakat di tengah wabah Covid-19. Besar harapan melalui kegiatan KKN Online ini, tetap dapat memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Meskipun banyak hambatan dan keterbatasan tidak mengurangi kekhidmatan mahasiswa KKN Online dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan memaknai arti pengabdian itu sendiri. □

*Indra Gunawan, Mahasiswa KKN-102 Online UIN Sunan Kalijaga.*

## Kedaulatan Rakyat

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarti, Mussenada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSh, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id)

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaru...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**SIUPP** (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYoga - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjoko.com](http://www.krjoko.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Isahaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 193, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.